



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAMLY KURNIAWAN TIRTO KUSUMO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 137127

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **728.000.000**

1. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 228.000.000
2. Bangunan Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **558.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, NISSAN TERRANO MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **91.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **616.908.042**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.993.908.042

III. HUTANG

Rp. 171.189.657

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.822.718.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.